



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, Fax. (0532) 21001  
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 060/ 150/ Bang/ 2019

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2019-2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reuiu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : Perubahan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**SUYANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Nomor : 060/ 150 /Bang/2019  
 Tanggal : 25 September 2019

### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INSTANSI** : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**TUGAS** : membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah

**FUNGSI** : 1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah  
 2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  
 3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah  
 4. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	Nilai hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Hasil evaluasi Tim Kemen PAN-RB	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Hasil Evaluasi LPPD oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Hasil Evaluasi LPPD oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
3	Tercapainya penyelesaian konflik pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	%	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan dibagi jumlah konflik pertanahan yang ditindaklanjuti dikali 100%	Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
4	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang saling selaras dibagi dengan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang disusun dikali 100%	RENJA, DPA, Skrinsut Rekap Rencana Umum Pengadaan, LHE LKjIP oleh Inspektorat, skrinsut monev Tepra Kabupaten Ktw. Barat	Bagian Adm. Pembangunan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	Hasil penilaian kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) oleh LKPP	Skrinsut laporan hasil verifikasi kematangan UKPBJ oleh LKPP pada aplikasi sistem Informasi UKPBJ	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
6	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per- UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	%	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan Produk Hukum dibagi jumlah Rancangan Produk Hukum yang masuk dikali 100%	Hasil Evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Bagian Hukum
7	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai	Indeks pelayanan keprotokolan pimpinan, pelayanan tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah hasil survey/ pengumpulan data	Hasil survey kepuasan terhadap pelayanan pimpinan dan tamu daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
8	Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	%	Jumlah kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan dibagi jumlah kewenangan di bidang perekonomian	SK Bupati dan Surat Bupati terkait kebijakan pengendalian di bidang perekonomian	Bagian Adm. Perekonomian, Infrastruktur & SDA
		Persentase Desa dan Kelurahan yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya	%	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya dibagi jumlah seluruh Desa dan Kelurahan di Kab. Kotawaringin Barat	Rekapitulasi Data/ Data Base Desa dan Kelurahan yang terfasilitasi PJU	Bagian Adm. Perekonomian, Infrastruktur & SDA
9	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai	Indeks layanan keagamaan dan kemasyarakatan hasil survey/ pengumpulan data	Hasil survey kepuasan terhadap pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan	Bagian Kesra & Kemasyarakatan

Sekretaris Daerah  
Kab. Kotawaringin Barat,



**SUYANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 199203 1 009